



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasana dan Pemberdayaan Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAN
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
-1	-2		-3		-4
1	-	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	-	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)	- 100%
	Keg	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri	-	Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)	- 100%
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kawasan Industri	-	Jumlah Laporan Pengawasan Kawasan Industri yang tersusun	- 1
		Terlaksannnya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan dan Peraturan Peraturan lainnya	-	Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayan dan Peraturan lainnya	- 1
		Terlaksannnya koordinasi terkait perkembangan perwilayahan, kawasan industri	-	Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, kawasan industri	- 1
	Sub.keg	Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku industri	-	Jumlah pelaku industri yang memenuhi standarisasi	- 50
		Tersedianya Sarana Prasana Penunjang Kegiatan Industri	-	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Industri yang Disediakan	- 2
	Sub.keg	Terbinanya Pelaku usaha industri	-	Jumlah pelaku usaha industri yang terbina	- 210
		Terfasilitasinya Pelaku usaha industri	-	Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi	- 130
		Terbinanya Sentra Industri	-	Jumlah sentra yang terbina	- 10 Sentra
2	-	Meningkatnya Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri	-	Persentase peningkatan Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri (%)	- 100
	Keg	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	-	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SIINas	- 100
	Sub.keg	Terfasilitasinya Pelaku Usaha Industri terdaftar masuk Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	Jumlah Pelaku Usaha yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terfasilitasi	- 100
		Terlaksannnya Pelayanan Permintaan/Bantuan data dan informasi industri	-	Jumlah pelayanan informasi/konsultasi industri	- 2
		Tersedianya data directory IKM	-	Jumlah data IKM yang terverifikasi	- 200
		Terlaksannnya rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Aparat Kabupaten/Kota	-	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama bersama Aparat Kabupaten/Kota	- 12
	Sub.keg	Terpublikasinya Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS)	-	Jumlah Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan Data Industri (SIPEDAS) yang terpublikasi	- 2
		Tersusunnya Buku Profil Industri Sulawesi	-	Jumlah Buku Profil Industri Sulawesi Tengah	- 1
		Tersusunnya laporan analisis industri Provinsi Sulawesi Tengah dalam SIINas	-	jumlah laporan analisisi industri provinsi Sulawesi Tengah dalam SIINas yang tersusun	- 1
		Terlaksannnya Integrasi Data (antara SIINas dan SIPEDAS SulTeng)	-	jumlah data yang terinput dan tervalidasi pada SIPEDAS yang bersumber dari SIINas	- 1
		Terlaksannnya Pelaporan SIINas Pemda bagi Aparat Dinas Pemda Kab/Kota	-	Jumlah Pelaporan pada SIINas Pemda bagi aparat Dinas Kab/Kota	- 13

	Terpantaunya kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah perusahaan dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terpantau	-	50
Sub.keg	Terpantaunya kepatuhan pelaku Industri dalam melakukan pelaporan	Jumlah pemantauan kepatuhan perusahaan yang melapor	-	2
	Tersusunnya laporan kepatuhan perusahaan	Jumlah laporan kepatuhan perusahaan	-	2

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
 = Rp. 4.986.000.300 APBD
 = Rp. 4.986.000.300
 Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri
 = Rp. 44.524.050
 Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 = Rp. 159.508.700
 Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 = Rp. 4.781.967.550
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**
 = Rp. 90.206.138 APBD
Keg Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 = Rp. 90.206.138
 Sub.keg Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 = Rp. 29.143.300
 Sub.keg Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas
 = Rp. 28.927.838
 Sub.keg Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
 = Rp. 32.135.000



Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

MIRA YULIASTUTI ST.MP
Nip.19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,
Plh. SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009



PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	66
Keg			
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi & pelaporan	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		2. Persentase capaian IKU Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	100
		2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	90
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100
	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1. Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	80
		2. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	80
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	100
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	80
		5. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	90
		2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	88.31
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada SPSE	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 19,938,474,357	APBD
Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	= Rp. 780,179,900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	= Rp. 16,749,050,447	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 176,472,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	= Rp. 628,012,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	= Rp. 170,271,100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 394,209,290	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	= Rp. 533,856,820	
	= Rp. 506,422,300	



Palu, 31 JAN 2025
PIHAK PERTAMA
PIB. SEKERTARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

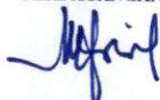
No	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2		-3	-4
1	-	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Tentang ketentuan perdagangan	- Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi ketentuan perdagangan	- 100%
	Keg.	Meningkatnya penerbitan rekomendasi teknis SIUP Minuman Beralkohol dan B2 bagi distributor sesuai standar	- Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang terlayani	- 100%
	Sub.keg	Terlayannya permohonan Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP MB dan Bahan Berbahaya bagi Distributor melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persentasi Permohonan Rekomendasi SIUP-MB dan B2 yang terlayani	- 100%
		Tersosialisasinya Peraturan perizinan Perdagangan bagi pelaku usaha	- Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan	- 60 orang
		Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota	- Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di Kabupaten/Kota (Kab. Morowali)	- 3 Pelaku Usaha
2	-	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang sesuai standar	- Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	- 10%
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditas sesuai dengan standar	- Persentase Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditi sesuai dengan standar	- 10%
	Sub.keg	Terbinanya Pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- Jumlah pasar yang difasilitasi menuju Standar Nasional Indonesia	- 1 Kab/ Kota (Morowali)
	Sub.keg	Terbinanya Pelaku Usaha yang difasilitasi di Pasar Lelang Komoditas	- Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi di pasar lelang komoditas	- 2 Pelaku Usaha
		Terevaluasinya pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- Jumlah Laporan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pasar lelang komoditas	- 1 Laporan
	Sub.keg	Terfasilitasinya Pembentukan Managemen SRG di Kab. Toli-Toli dan Kota Palu	- Jumlah SRG yang terfasilitasi Pembentukan Managemennya	- 2 SRG
3	-	Meningkatnya Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	- Persentase Koefisien Variasi Harga Antar waktu	- 7.36%
	Keg.	Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- 100%
	Sub.keg	Termonitoringnya ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Subdistributor di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan ketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat distributor dan subdistributor di 13 Kab/Kota	- 4 Laporan
		Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 13 Kab/Kota	- 1 Kegiatan
	Sub.keg	Termonitoringnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor di 13 Kab/Kota	4 laporan
		Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13 Kab/Kota	1 Kegiatan
	Keg.	Meningkatnya Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	- 90%
	Sub.keg	Tersusunnya Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Jumlah Dokumen Analisis Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- 1 Dokumen
		Terpantaunya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	- Jumlah Laporan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota	- 4 Laporan
	Sub.keg	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Pokok Murah dalam rangka Stabilisasi Harga	- Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar bersubsidi dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Pokok	- 9 Kegiatan
	Keg.	Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat daerah Provinsi	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	- 90%

		Tersusunnya laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	-	Jumlah Laporan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	-	1 Laporan
	Sub.keg	Terkoordinasinya Penyaluran pupuk bersubsidi	-	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	-	5 Laporan
4	-	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dilkutsertakan pada kegiatan pemasaran produk dalam negeri	-	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dilkutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
	Keg.	Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	-	Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri	-	10%
		Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri	-	3 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dilkutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	-	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dilkutsertakan pada bimtek produk dalam negeri	-	10%
		Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri	-	25 UMKM
	Sub.keg	Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	Persentase masyarakat yang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri	-	80%
	Sub.keg	Tersosialisasinya kepada masyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	70 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 78,766,650	APBD
Keg. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan	= Rp. 78,766,650	
Sub.keg Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	= Rp. 78,766.650	
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 191,038,800	APBD
Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi	= Rp. 191,038,800	
Sub.keg Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	= Rp. 76,548.850	
Sub.keg Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	= Rp. 71,933,000	
Sub.keg Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi	= Rp. 42,556.950	
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	= Rp. 1,570,790,550	APBD
Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	= Rp. 110,756,950	
Sub.keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	= Rp. 69,101.250	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	41,655,700	

Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	=	Rp.	1.395.862.850	
Sub.keg	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	=	Rp.	171.032.900	
Sub.keg	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	=	Rp.	1.224.829.950	
Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah	=	Rp.	64.170.750	
Sub.keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	=	Rp.	64.170.750	
4.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	=	Rp.	255.899.000	APBD
Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	=	Rp.	107.037.250	
Sub.keg	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	=	Rp.	107.037.250	
Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	=	Rp.	108.299.750	
Sub.keg	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	=	Rp.	108.299.750	
Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk	=	Rp.	40.562.000	
Sub.keg	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	=	Rp.	40.562.000	

PIHAK KEDUA
Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



MIRA YULIASTUTI, ST, MP
NIP. 19730831 200012 2 002

Palu,

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN DALAM NEGERI



DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
NIP. 19770405 200212 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FAJAR SETIAWAN, SE, MM**
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH




FAJAR SETIAWAN, SE, MM
NIP. 19830304 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	- Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri	- 100%
	Keg Meningkatkan Pelayanan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) sesuai ketentuan yang berlaku	- Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	- Persentase Pelayanan Klinik Ekspor Sulteng yang terlayani	- 100%
	Sub.Keg Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya menumbuhkan ekosistem	- Jumlah mahasiswa tersosialisasi	- 40 orang
	Sub.Keg Sosialisasi Kebijakan dan Layanan Ekspor Impor	- Jumlah Pelaku Usaha dan Aparat	- 40 orang
2	- Terwujudnya Pengembangan Ekspor	- Nilai ekspor	- 26478.59 Juta USD
	Keg Meningkatkan Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah	- Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi	- 100%
	Sub.Keg Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- Jumlah Pelaku Usaha/produk yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	- 3 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	- 27 Pelaku Usaha
	Sub.Keg Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran Dagang Lokal	- 3 Laporan
	Sub.Keg Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui media publikasi	- Jumlah media publikasi promosi Produk Unggulan Ekspor Daerah	- 1 Media
	Sub.Keg Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor	- Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan Go Ekspor yang mengikuti FGD	- 40 Pelaku usaha
	Sub.Keg Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi Tengah	- Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi Tengah yang mengikuti identifikasi kualitas kopi	- 40 Pelaku usaha

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 236.290.850	APBD
Keg Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi	= Rp. 236.290.850	
Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	= Rp. 236.290.850	
2. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 671.189.600	APBD
Keg Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui	= Rp. 671.189.600	
Sub.Keg Pameran Dagang Internasional/Nasional	= Rp. 217.456.000	
Sub.Keg Pameran Dagang Lokal	= Rp. 276.548.550	
Sub.Keg Peningkatan Citra Produk Ekspor	= Rp. 177.185.050	

Palu, 13 1 JAN 2025



PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR
NEGERI

FAJAR SETIAWAN, SE, MM
Nip. 19830304 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO MARDIONO, S.T., M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


EKO MARDIONO, S.T., M.A.P
NIP. 19770302 201001 1 008

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)	100%
Keg	Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP	Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)	100%
Sub.keg	Tersusunnya dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) Sulawesi	Jumlah dokumen teknis rencana pembangunan industri provinsi (RPIP) yang tersusun	1
	Terfasilitasinya penyusunan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.	Jumlah laporan rencana pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasilitasi	1
Keg	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPIP	Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)	100%
Sub.keg	Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri	Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku Industri (Laporan)	1
	Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan industri	Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana pembangunan industri (Laporan)	2
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)	100%
Keg	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku Industri	Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)	100%
Sub.keg	Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri	Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia (Laporan)	1
Keg	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)	100%
Sub.keg	Terlatihnya Tenaga Kerja Industri	Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)	20
	Terfasilitasinya HAKI	Jumlah Sertifikat HAKI yang Ttfasilitasi	79
Keg	Meningkatnya Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan	Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang	95%
Sub.keg	Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.	Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)	1
	Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)	1
3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Pelaku Usaha Industri	Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)	77%
Keg	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)	77%
Sub.keg	Terawasinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi	3
Sub.keg	Terkendalinya Perizinan Berusaha sektor perindustrian	Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terkendali	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 1.100.470.800	APBD
Keg Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	= Rp. 1.100.470.800	
Sub.keg Penyusunan Renacana Pembangunan Industri	= Rp. 284.134.450	
Sub.keg Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	= Rp. 184.055.050	
Sub.keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	= Rp. 632.281.300	

2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**
- Keg** Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
- Sub.keg** Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- Sub.keg** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi

= Rp. 277.999.750 APBD

= Rp. 277.999.750

= Rp. 170.089.150

= Rp. 107.910.600



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERdagangan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERdagangan
SULAWESI TENGAH
NIP. 19730831 200012 2 002

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
INDUSTRI

EKO MARDIONO, S.T., M.A.P.
NIP. 19770302 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA, SE
NIP. 19731121 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	- 100
		- 2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	- 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	- 4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	- 2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	- 91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	- 3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	- 100
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjuti laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	- 4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	- 80
		- 5. Persentase Tindaklanjuti Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	- 100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	- 90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 90
		- 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	- 88.31
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Persentase barang milik daerah yang dipelihara	- 80
-	Meningkatnya Fasilitas Jasa Layanan IKM	- Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)	- 100%
Keg	Meningkatnya Kualitas Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri	- Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas	- 100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	- Rp. 982,971,623	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 504,900,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 64,486,765	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 86,125,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 184,411,858	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 143,048,000	
2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Rp. 1,023,301,752	APBD
	Rp. 1,023,301,752	

Palu, 31 JAN 2025



PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN KERAJINAN DAERAH

HAPIT TOLLA SE
NIP. 19731121 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M**
Jabatan : **Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : **Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19730831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIDJI, S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	- INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	- 66
Keg	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	- 1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	- 100%
		- 2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	- 1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	- 4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	100
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	80
		5. Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	- Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	- 90
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- 90
		- 2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	- 88.31
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	- Presentasi barang milik daerah yang dipelihara	- 80
-	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan	- Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang Terakreditasi	- 100
Keg	Pengujian mutu komoditi yang memenuhi standar	- Persentase pengujian komoditi yang memenuhi standar	- 100
	Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	- Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	- 100

Program

Anggaran

Keterangan

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi**
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = Rp. 7,193,857,805
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah = Rp. 284,430,000
 - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah = Rp. 172,926,281
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = Rp. 6,399,941,876
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan = Rp. 234,109,648
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan = Rp. 102,450,000
- Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**
 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota = Rp. 529,227,358
 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota = Rp. 529,227,358



Paku, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NOLYANITA LADJIDJI, S. Ag. M.M.
NIP. 19730801 200701 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**
Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK KEDUA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
NIP. 19750831 200012 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH

DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan	INDEKS RB PERANGKAT DAERAH	66
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	100
		2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	90
	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	4
	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	91
	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan	90
		2. Nilai Hasil Survey Kepuasan	88.31
	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	80
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen	Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang difasilitasi	100
	Meningkatnya fasilitasi perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	80

Program

Keterangan

1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi	=	Rp392,483,200	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	=	Rp231,960,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	=	Rp57,364,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	=	Rp48,606,800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	=	Rp54,551,900	
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	=	Rp1,235,414,000	APBD
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	=	Rp1,013,626,150	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	=	Rp221,787,850	



Pada 31 JAN 2025
PIHAK PERTAMA
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

DEDDY SUARMAN, SE., MM.
Nip. 19691109 199903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIRA YULIASTUTI, ST.MP**

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **H. RUSDY MASTURA**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 JAN 2025

PIHAK KEDUA,

GOVERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA,
Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MIRA YULIASTUTI, ST.MP
Pembina Tkt.I
NIP. 19730831 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerataan Harga Barang Pokok antar Wilayah di Sulawesi Tengah	- Koefisien Variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	- 7.2%
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas di Sulawesi Tengah	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas	- 41.45%
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan di Sulawesi Tengah	- Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Sektor Perdagangan	- 7.07%
4	Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih	- Nilai Ekspor Bersih	- 11949.06 Juta USD

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= Rp. 28.507.786.985	APBD
2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	= Rp. 315.057.500	APBD
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	= Rp. 191.038.800	APBD
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Baran	= Rp. 1.570.790.550	APBD
5. Program Pengembangan Ekspor	= Rp. 671.189.600	APBD
6. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	= Rp. 1.764.641.358	APBD
7. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	= Rp. 255.899.000	APBD
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	= Rp. 7.109.772.852	APBD
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	= Rp. 277.999.750	APBD
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	= Rp. 90.206.138	APBD
11. Program Perdagangan Dalam Negeri	= Rp. 158.955.000	APBN
14. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	= Rp. 673.537.000	APBN

PIHAK KEDUA,

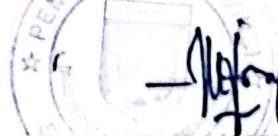
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

Palu, 30 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,
Pih. KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


MIRA YULASTUTI, ST.MP
Pembina Tkt.I
NIP. 19730831 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROY EDWARD KUMAAT, SE**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ROY EDWARD KUMAAT, SE
NIP. 19820321 200904 1 004

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



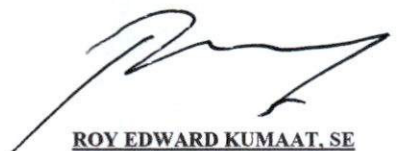
DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	Keg. Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	-	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	81
		-	2. Persentase capaian IKU Perangkat Daerah		
	Sub Keg. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	14
	Terlaksananya Rakor Perindag Se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara		Jumlah Rakor Perindag Se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara		1
	Sub Keg. Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	-	1
	Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	1
	Sub Keg. Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	-	1
	Sub Keg. Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	1
	Sub Keg. Tersusunnya dokumen capaian IKU Perangkat Daerah. dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah.lainnya	-	Jumlah laporan capaian IKU PD dan dokumen evaluasi kinerja PD.lainnya	-	8

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Rp780,179,900	
Sub Keg. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp604,933,550	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10,824,750	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp6,050,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp6,150,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp5,976,550	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp146,245,050	

 **PIHAK KEDUA**
Rh. Sekretaris Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
DONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

Palu, **31 JAN 2025**
PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Program

ROY EDWARD KUMAAT, SE
Nip. 19820321 200904 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **13 1 JAN** 2025

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DONNY IWAN SETIAWAN, ST.MM
NIP. 19770405 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
NIP. 19710906 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

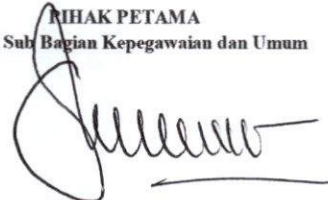
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
(1)	(2)		(3)	(4)	
	Keg.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1. Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	-	
			2. Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	-	
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	4 Dokumen
		Terlaksananya layanan kepegawaian	Jumlah laporan layanan kepegawaian	-	2 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	18 Orang
	Sub Keg.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi / FGD/ Bimtek/ Kegiatan Lainnya	-	60 Orang
		Tersosialisasinya ASN tentang Aplikasi Kepegawaian dan Umum	Jumlah ASN yang terbina	-	134 Orang
	Keg.	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	4
	Keg.	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4
	Keg.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	4
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindak lanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	-	
			5. Persentase Tindak lanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lanor	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	12
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	4
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	
			2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	-	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	-	12
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12
	Keg.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	-	100
	Sub Keg.	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	2
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	5
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	9
		Tersusunnya Laporan P3DN sesuai TKDN	Jumlah Laporan P3DN sesuai TKDN	-	1

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp170,271,100	
Sub Keg.	1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp7,700,000	
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp105,240,000	
	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp57,331,100	
	Administarsi Umum Perangkat Daerah	Rp394,209,290	
Sub Keg.	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10,060,830	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp123,492,210	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp39,381,400	
	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp33,600,000	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp187,674,850	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp533,856,820	
Sub Keg.	1 Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp300,000	
Sub Keg.	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp381,895,200	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp151,661,620	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Rp506,422,300	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Keg.	1 Pengadaan kendaraanperorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp367,180,000	
Sub Keg.	2 Pengadaan Mebel	Rp39,699,600	
Sub Keg.	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp99,542,700	



PIHAK KEDUA
Pih. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
MONNY IWAN SETIAWAN, ST, MM
Nip. 19770405 200212 1 009

Palu,

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

ROSTANTI KARU, S.Sos., M.Adm.KP
Nip. 19710906 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURDIANA, SE, MM**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM**
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Plh. SEKRETARIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DONNY IWAN SETIAWAN, ST. MM
NIP. 19770405 200212 1 009

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NURDIANA, SE, MM
NIP. 19731202/200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)		(3)		(4)	
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	100
				2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah		90
	Sub Keg.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	134
	Sub Keg.	Tersedianya honorarium PHL	-	Jumlah PHL yang menerima honorarium	-	54
	Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	500
	Sub Keg.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12
	Sub Keg.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1
	Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	-	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	-	2
	Sub Keg.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	14
	Sub Keg.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	-	100
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	1
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1
	Sub Keg.	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	2
	Sub Keg.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1
	Keg.	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	-	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	-	100
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	48
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	287
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp16,749,050,447	
Sub Keg. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp15,134,383,497	
Sub Keg. 2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp972,600,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp371,490,000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp139,715,950	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp46,700,000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp41,747,000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Rp26,014,000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp16,400,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp176,472,000	
Sub Keg. 1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp70,000,000	
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp48,700,000	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp30,100,000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp27,672,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp628,012,500	
Sub Keg. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp428,182,500	
Sub Keg. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp139,830,000	
Sub Keg. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp60,000,000	



Palu, **31 JAN 2025**

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

NURDIANA, SE, MM
 Nip. 19731202 200212 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN. M, ST, MM**
Jabatan : Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



HAPIT TOLLA,SE

NIP. 19931121 200701 1 009

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK
PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RIDWAN. M, ST, MM

NIP. 19680721 201112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		3	4
	Keg dan Sub kegiatan	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri	- Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas	- 100 %
	Sasaran	Terfasilitasinya layanan kemasan produk dan kerajinan bagi pelaku usaha IKM dan Masyarakat	- Jumlah Jasa dan layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM dan Masyarakat yang terfasilitasi	- 535 Pelaku IKM dan Masyarakat
		Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk kemasan dan kerajinan	- Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina	- 110 Pelaku IKM
		Terkelolanya website layanan IKM Kemasan	- Jumlah Website admin rumah kemasandan layanan IKM yang dikelola	- 1
		Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana koordinasi , sinkronisasi , dan pelaksanaan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan .	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan industri kemasan dan kerajinan	1 Dokumen
		Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah Sumber layanan Rumah Kemasan	- Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan rumah kemasan	- Rp 100.000.000,00

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Anggaran

Keterangan

Rp 897.930.782,00

Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

Rp 897.930.782,00

PIHAK KEDUA



HANI TOLLA, SE

Nip. 19730121 200701 1 009

PIHAK PETAMA

Kepala Seksi Kemasan dan Kerajinan

Ridwan, M. ST.MM

Nip. 196807212001121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERADIAN SAPHIRE,SP,MM**
Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HAPIT TOLLA,SE**
Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN PRODUK
INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN
DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH



Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN
PRODUK PANGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
NIP. 19750319 199603 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		3	4
	Keg. Sub Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Eevaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	- Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas	- 100
	Sasaran	Terfasilitasinya promosi dan pemasaran produk IKM	Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM yang terfasilitasi	- 100
		Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat	Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang terfasilitasi	- 250
		Terfasilitasinya jasa layanan produksi	Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi	- 50
		Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk	Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina	- 50
		Tertribusinya Pendapatan Asli Daerah Sumber layanan Galeri Rumah Cokelat	- Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan Galeri rumah Cokelat	- Rp 50.000.000,00
		Terfasilitasinya kerjasama pengembangan produk IKM dengan pihak swasta	Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang terfasilitasi	1

Kegiatan
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Anggaran
Rp 125.370.970,00

Keterangan

Sub. Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

Rp 125.370.970,00

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi sulawesi tengah

NIP. 19731121 200701 1 009

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan

VERADIAN SAPHIRE,SP,MM
Nip. 19750319 199603 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **HAPIT TOLLA, SE**

Jabatan : Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan Dan Kerajinan Daerah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

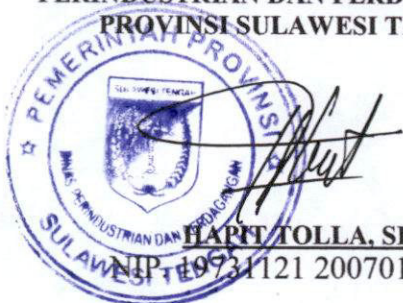
PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGEMBANGAN
PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN
KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



HAPIT TOLLA, SE

NIP. 19731121 200701 1 009

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN
DAN KERAJINAN DAERAH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LOBAN SUBU J. MANOPPO, SE

NIP. 19780622 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanjnt Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	100
				2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	90
	Sub Keg.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Keg.	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	-	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	-
	Sub Keg.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
	Keg.	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	-	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	-
	Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1
	Keg.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	-	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	-
	Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjnt laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	-	4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	-
			-	5. Persentase Tindaklanjnt Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	-
	Sub Keg.	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	-	Jumlah Laporan Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Keg.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	-	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	-
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-
			-	2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	-
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1
	Keg.	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	-	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	80
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LEVIANA MANGOPO, ST**
Jabatan : Kepala Seksi Kalibrasi

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KALIBRASI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LEVIANA MANGOPO, ST
NIP. 19851031 201101 2 006

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
	Keg. Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar		Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang memenuhi standar	-	100
Sub Keg.	Terlayannya permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha	-	Persentase permohonan kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang terlayani	-	100%
	Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui surveillance	-	Hasil penilaian surveillance	-	100%
	Terukurnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi	-	Nilai hasil uji profisiensi	-	100%
	Rekalibrasi alat standar	-	Jumlah alat yang di rekalibrasi	-	10 Alat Kerja
	Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	-	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan kalibrasi	-	3 Dokumen
	Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Peralatan Ukur	-	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	-	7 orang

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Produk di Seluruh Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Keg. 1 Pengembangan Layanan Kalibrasi

Rp127,492,250.00
Rp127,492,250

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
ADJIDJI, S. Ag., M.M
Nip. 19830801 200701 2 029

Palu, 31 JAN 2025
PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kalibrasi
LEVIANA MANGOPO, ST
Nip. 19851031 201101 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WIDYAWATI, S.Pt**
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**
Jabatan : Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN 2** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WIDYAWATI, S.Pt
NIP. 19750607 200112 2 004

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
	Keg.	Pengujian mutu komoditi yang memenuhi standar	-	Persentase pengujian komoditi yang memenuhi standar	- 100
		Terpantaunya Mutu Produk Unggulan	-	Jumlah Produk Unggulan yang terpantau	- 2 Produk
	Sub Keg.	Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia untuk Pemantauan Mutu Produk	-	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	1 Paket
		Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Profisiensi	-	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	1 Orang
	Sub Keg.	Terlayaninya permohonan Pengujian mutu barang	-	Persentase permohonan Pengujian Mutu Barang yang terlayani	100%
		Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan	-	Jumlah kegiatan Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang Lingkup Nutrisi Pangan	1 Kegiatan
		Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian	-	Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing	8 Orang
		Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia	-	Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia yang tersedia	1 Paket
		Terukurnya kinerja laboratorium melalui uji profisiensi	-	Nilai hasil uji profisiensi	100%
		Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian	-	Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan pengujian	1 Dokumen
	Sub Keg.	Terfasilitasinya Produk pelaku usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI	-	Persentase Produk usaha yang tersertifikasi penggunaan tanda SNI	100%
		Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait pemberian layanan sertifikasi kopi bubuk	-	Jumlah tenaga teknis yang terbimbing	6 Orang
		Terjaminnya kualitas Layanan Lembaga Sertifikasi Produk melalui surveillance (Penambahan Ruang Lingkup Produk)	-	Hasil penilaian surveillance	100%
		Terusulnya penambahan Ruang Lingkup sertifikasi produk kopi bubuk	-	Jumlah dokumen penambahan Ruang Lingkup sertifikasi produk kopi bubuk	1 Dokumen

Kegiatan
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Produk di Seluruh Daerah
Kabupaten/Kota

- Sub Keg. 1 Pemantauan Mutu Produk
2 Pengembangan Layanan Pengujian
3 Pengembangan Layanan Sertifikasi Produk



PIHAK KEDUA
Kepala PTU Pengujian Sertifikasi
Mutu Barang

WIDYAWATI, S. Ag., M.M
Nip. 19730801 200701 2 029

Anggaran

Keterangan

Rp401,735,108.00

Rp114,595,100
Rp209,300,558
Rp77,839,450

Palu,

31 JAN 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

WIDYAWATI, S. Ag.
Nip. 19750607 200112 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARFAN,S.Ap**

Jabatan : **Plt. Kepala Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NOLVANITA LADJIDJI, S. Ag, M.M**

Jabatan : **Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

**PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGUJIAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


NOLVANITA LADJIDJI S.Ag, M.M
NIP. 19730801 200701 2 029

**PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


SARFAN,S.Ap
NIP. 19691205 199103 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
-1	-2		-3		-4
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanjut Hasil Pemeriksaan	-	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	- 100%
			-	2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	- 90
	Sub Keg.	Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan BMD	-	Jumlah pegawai yang menerima honorarium	- 54
	Keg.	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	-	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	-
	Sub Keg.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- 1
	Keg.	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	-	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	-
	Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- 1
	Keg.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	-	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	-
	Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- 1
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindakanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	-	4. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	-
			-	5. Persentase Tindakanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	-
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1
	Keg.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	-	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	- 60
	Sub Keg.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Sesuai dengan Jml alat rencana DAK
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-
	Sub Keg.	Tersusunnya laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat	- 1
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	-
	Sub Keg.	Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- 12
		Tersusunnya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1
	Keg.	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	-	Presentasi barang milik daerah yang dipelihara	- 80
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- 6
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- 6
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- 65
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	- 1

Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit
Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp284.430.000	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp284.430.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp172.926.281	
Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.237.246	
Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp49.011.735	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp31.310.300	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp89.367.000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Rp6.399.941.876	
Sub Keg.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp6.399.941.876	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp234.109.648	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.498.000	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp168.737.496	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp49.874.152	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp102.450.000	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp4.050.000	
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp48.600.000	
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp49.800.000	



Palu, 31 JAN 2025
 PIHAK PETAMA
 Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
 Sarfan, S. Ap
 Nip. 19691205 199103 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDWAN N.ALI,SE**

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga Dan Penegakkan Hukum

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN
JASA, TERTIB, NIAGA DAN PENEGAKKAN
HUKUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

RIDWAN N.ALI,SE
NIP. 19780531 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

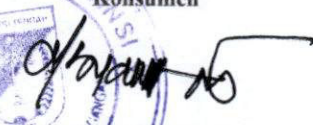
No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)
	Keg.	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	- 80
	Sub Keg.	Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai parameter ketentuan	-	Jumlah laporan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan Perlindungan	- 2 Laporan
		Terlaksananya Pengawasan Jasa sesuai parameter ketentuan	-	Jumlah laporan pengawasan Jasa yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen	- 1 Laporan
		Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	-	Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan dan Tertib Niaga	1 Laporan
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan	-	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis bidang pengawasan	4 Orang
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Pengawasan Barang	-	Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi pengawasan barang beredar	1 kegiatan
	Sub Keg.	Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan	-	Jumlah Kasus Yang ditangani	8 Kasus

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Rp221,787,850	
Sub Keg.	1 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp142,873,250	
	2 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Rp78,914,600	

Palu,

31 JAN 2025

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen


DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006



PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Pengawasan Barang Dan Jasa, Tertib, Niaga
Dan Penegakan Hukum


RIDWAN N. ALISE
Nip. 19780531 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRIYANI, SE**

Jabatan : Kepala Tata Usaha UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**

Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA TATA USAHA UPTD
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

INDRIYANI, SE
NIP. 19711018 199202 2 006

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPTD PENGAWASAN DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)		(3)		(4)	
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	-	1. Persentase TLHP BPK Dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	-	100
			-	2. Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	-	90
	Sub Keg.	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1
	Keg.	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	-	1. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4
	Keg.	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	-	2. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1
	Keg.	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	-	3. Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	-	
	Sub Keg.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1
	Keg.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	1. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	-	
			-	2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	-	
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1
	Keg.	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	-	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	-	80
	Sub Keg.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	4
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	13
	Sub Keg.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	-	1

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp231,960,000	
Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp231,960,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp57,364,500	
Sub Keg.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp19,194,350	
Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp4,010,150	
Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp34,160,000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp48,606,800
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp47,256,800
Sub Keg.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp1,350,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp54,551,900
Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30,856,900
Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp8,690,000
Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp15,005,000



PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis
Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan
Konsumen

INDRIYANI, SE
Nip. 19711018 199202 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PURWATA,SE**
Jabatan : Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDDY SUARMAN, SE., MM**
Jabatan : Kepala UPTD Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, **31 JAN** 2025

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DEDDY SUARMAN, SE., MM
NIP. 19691109 199903 1 006

PURWATA,SE
NIP. 19710610 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
(1)	(2)		(3)		(4)	
	Keg.	Meningkatnya fasilitasi perlindungan konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100
	Sub Keg.	Terfasilitasinya aduan konsumen	-	Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi	-	43
		Terverifikasi dan terevaluasinya kinerja BPSK secara berkala	-	Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi kinerja BPSK	-	4 Laporan
	Sub Keg.	Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Kab Banggai	-	Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai	-	1 BPSK
		Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen	-	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi BPSK dan prosedur pengaduan konsumen		3 kegiatan
		Tersaksananya Survey IKK (Indeks Keberdayaan Konsumen)	-	Jumlah responden yang mengisi Kuisioner		100 Orang
		Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota	-	Jumlah BPSK Kab/Kota yang terfasilitasi		4 BPSK
	Sub Keg.	Tersosialisasinya Kinerja LPKSM di daerah Kabupaten Banggai	-	Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait terkait kinerja LPKSM		50 orang

- Kegiatan**
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Keg. 1 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
- 2 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
- 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Anggaran
Rp1,013,626,150

Rp932,755,750

Rp44,004,400

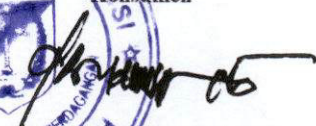
Rp36,866,000

Keterangan

Palu, 31 JAN 2025

PIHAK PETAMA
Kepala Seksi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen


DEDDY SUARMAN, SE., MM
Nip. 19691109 199903 1 006




PURWATA, SE
Nip. 19710610 199103 1 005